

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik merupakan bagian dari perpustakaan siklus yang memang sering terjadi di berbagai tempat. Semakin kompleksnya masyarakat dan semakin banyaknya pengaruh dari negara-negara kuat di dunia membuat negara bergerak secara dinamis. Wilayah Timur Tengah selama ini seakan tidak pernah luput dari canut manut buah-buah konflik yang selalu menghiasi *head line* media-media di seluruh dunia.

Timur Tengah adalah wilayah yang lekat dengan konflik yang seakan tidak pernah selesai. Sumber daya alam di wilayah Timur Tengah terutama minyak, membuat kawasan ini menjadi wilayah yang selalu memunculkan buah-buah konflik. Berbagai kepentingan negara-negara, baik yang termasuk dalam kawasan Timur Tengah maupun yang bukan termasuk dalam kawasan ini, satu sama lain berusaha mencapai kepentingannya masing-masing dengan berbagai cara. Sebab kepentingan-kepentingan tersebutlah stabilitas di Timur Tengah kerap menjadi sorotan dunia internasional (Indriana, 2017).

Persoalan internal ataupun eksternal yang terbilang kompleks tersebut menjadikan kawasan Timur Tengah sebagai pusat perhatian dunia internasional. Konflik atau perang memang sesuatu yang memang tidak dapat dihindari oleh umat manusia dan itu sudah ada sedari dulu dan tetap akan selalu menghiasi sejarah peradaban, mulai dari konflik antar individu, kelompok, keluarga hingga klan dan konflik ini akan terus

berlanjut walaupun orang tersebut sudah memenuhi apa yang dia harapkan baik secara materi maupun kedudukan.

Konflik eksternal menjadi fokus penulis dalam penelitian ini, yaitu adalah kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat mempunyai agenda politik yang bertujuan memperluas hegemoninya di kawasan tersebut. Akan tetapi hal tersebut dihambat dengan isu pengembangan teknologi nuklir yang dilakukan oleh Iran. Hal tersebut dianggap isu yang sangat serius bagi Amerika Serikat, hingga pada masa pemerintahan Presiden George W. Bush mengatakan dirinya tidak menginginkan negara yang diktator dan menyatakan perang melawan terorisme. Pernyataan tersebut ditanggapi oleh Iran melalui Komandan Garda Revolusi Iran, Yahyam Hakim yang menyatakan, “Amerika, Inggris dan Rezim Zionis (Israel) merupakan poros kejahatan terhadap dunia Islam dan seluruh umat manusia”.

Aktivitas nuklir Iran dimulai pada tahun 1956, diawali dengan dibangunnya Pusat Atom di Universitas Teheran yang bekerjasama dengan pemerintahan Amerika Serikat. Awalnya hanyalah untuk kepentingan akademis, Amerika mengoperasikan reaktor berkapasitas lima mega watt. Pada masa pra revolusi Iran, tepatnya pada tahun 1971 rezim Syah Pahlevi mengembangkan proyek nuklir dengan menjalin beberapa kerjasama bersama beberapa negara Eropa. Layaknya pengembangan reaktor Darkhoin dengan Prancis dan reaktor Busher dengan Jerman. Semua kerjasama tersebut dihentikan akibat dari revolusi Islam di Iran. Walaupun Iran telah memutuskan kerjasama bersama negara

Eropa, namun tidak begitu saja menghentikan proyek nuklirnya. Sampai-sampai, Iran dengan keyakinan dirinya melanjutkan Pabrik Uranium di Isfahan membangun mega instalasi nuklir Natanz yang digunakan untuk pengayaan uranium (Bakhtiar, 2019)

Disamping banyaknya manfaat yang diberikan oleh tenaga nuklir ini, tentu saja terdapat dampak negatif dari energi nuklir tersebut. Salah satunya adalah apabila terjadi kebocoran nuklir yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap *reactor* nuklir dan terjadi ledakan nuklir yang dahsyat. Hal tersebut menjadi kekhawatiran dalam adanya kegiatan pengembangan nuklir. Belum lagi apabila nuklir ini dijadikan sebagai sebuah kekuatan atau *power* bagi sebuah negara untuk mempengaruhi ataupun mengendalikan negara lain.

Pasca revolusi Iran pada 1979, negara tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor historis imperialisme, ideologi islam dan cenderung lebih anti barat. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi Amerika Serikat mengingat Iran sekarang ini tidak lagi menjadi sekutu bagi Amerika Serikat dan Iran kembali menjadi negara anti barat.

Menurut Annie Tracey Samuel dari *Research fellow in international security program* pada *Harvard kennedy school's Belfer Center For Science and Internasional Affairs*, menganggap bahwa selama ini kebijakan yang diambil oleh pemerintah Iran menggunakan pendekatan repressif dalam mencapai seluruh target strategi politik luar negerinya. Hal ini mengartikan bahwa tujuan dan arah kebijakan luar

negeri Iran adalah untuk melakukan supremasi politik atau keamanan rezim jangka panjang serta keseimbangan regional di kawasan Timur Tengah. Mengingat saat ini Amerika Serikat dan Israel menjadi aktor negara yang menghegemoni di kawasan Timur Tengah. Oleh sebab itu, senjata nuklir menjadi instrumen yang dinilai efektif untuk mencapai tujuan dari kebijakan Iran.

Keberhasilan Iran dalam pengembangan energi nuklir di negaranya tentu saja menjadi ancaman bagi Amerika Serikat atas kepentingan-kepentingan Amerika Serikat yang ingin menjadi hegemon di kawasan Timur Tengah. Program pengembangan nuklir yang dikembangkan oleh Iran tersebut merupakan bentuk dari kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah Iran dalam rangka memenuhi kepentingan nasionalnya.

Dapat dilihat bahwa dari sisi kedua negara, baik Iran maupun Amerika Serikat keduanya sama-sama berusaha agar menjaga kepentingan nasionalnya masing-masing. Iran mengembangkan nuklir dengan tujuan untuk mengamankan negaranya dan meningkatkan *bargaining power*, Iran didalam dunia politik internasional selain itu juga demi kepentingan pencadangan energi nasionalnya sendiri. Hal tersebut tentu saja menjadi suatu masalah yang cukup serius bagi Amerika Serikat. Amerika Serikat menentang upaya tersebut karena menganggap bahwa ada kepentingan nasional di kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat pun tidak ingin kehilangan pengaruhnya sebagai negara hegemon di kawasan Timur Tengah.

Definisi mengenai senjata nuklir dituliskan dalam piagam PBB tentang persenjataan dan pelucutan senjata sebagai berikut: Senjata nuklir adalah suatu senjata yang membuat dampak yang sangat amat dahsyat yang berasal dari reaksi berantai oleh penggabungan inti atom, serta berdaya rusak jauh lebih besar dibandingkan senjata-senjata konvensional lainnya sebab dapat menimbulkan gelombang udara, ledakan dan panas. Api dan radiasi langsung serta radiasi susulan atau biasa dibidang nuklir merupakan senjata yang menghadirkan prinsip-prinsip penggabungan (fusi) untuk menghancurkan targetnya.

Perihal nuklir, Iran membatasi program nuklirnya pada kesepakatan yang dijalin di tahun 2015 bersama semua negara anggota Dewan Keamanan Tetap PBB + Jerman atau yang sering disebut P5+1. Namun, Amerika Serikat berupaya keluar dari kesepakatan tersebut sejak Donald Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Di samping itu Iran juga sudah menandatangani *Nuclear Non – Proliferation Treaty* (NPT) dan sudah bersikukuh bahwa program nuklir yang dikembangkannya hanya untuk tujuan damai. Kesepakatan nuklir Iran diyakini dapat menjadi perubahan yang positif dalam kancah politik internasional. Di sisi lain beberapa negara tetangga memiliki kekhawatiran akan kesepakatan tersebut, Dalam lingkup yang lebih besar, hal tersebut dianggap baik dan disambut hangat oleh kekuatan dunia.

Sebelumnya, Iran dihadapkan dengan beberapa sanksi yang membuatnya mengalami krisis ekonomi. Tak diragukan lagi hal tersebut

mengakibatkan kerusakan yang sulit untuk memperbaiki sektor perdagangan, ekspor minyak dan ekonomi Iran secara umum. Namun perlu dicatat, bahwa kesepakatan tadi diprakarsai oleh Barat pada tahun 2003, selama masa jabatan Presiden Mehmood, akan tetapi saat itu belum ada kesepakatan yang dicapai. Baru pada tahun 2013, ketika Presiden Rohani menjabat, negosiasi antara P5+1 bersama Iran dimulai kembali dengan tujuan jelas untuk menyelesaikan persoalan nuklir tersebut dengan cara yang damai.

Dalam kasus persengketaan persenjataan di Iran, Amerika Serikat menilai bahwa Iran adalah pihak yang kontra kepada Barat khususnya Amerika, Arab Saudi meskipun bukanlah pemimpin garda depan politik Timur Tengah tapi Arab Saudi berkedudukan sebagai pemegang pimpinan spiritual di Timur Tengah, yang mampu membendung Iran dalam percaturan politik dengan mengandalkan Panislamisme.

Tepat pada tanggal 8 Mei 2018 Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengungkapkan bahwa Amerika Serikat telah secara resmi keluar dari kesepakatan *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)*. Trump berpendapat bahwa JCPOA merupakan kesepakatan sepihak yang sehausnya tidak pernah dibuat dan menegaskan untuk kembali menetapkan sanksi untuk Iran. JCPOA merupakan kesepakatan yang disepakati oleh 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, China dan Uni Eropa yang diwakilkan oleh Jerman (atau dipersingkat dengan P5+1). Kesepakatan ini berisikan kesediaan Iran untuk membatasi aktivitas nuklirnya dengan

jaminan ditariknya sanksi ekonomi. Pada 14 Juli 2015, JCPOA ditandatangani di Wina, akan tetapi hanya berlangsung 3 tahun, Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan tersebut, walaupun Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) memberikan penilaian bahwa Iran telah memenuhi kewajiban yang sesuai dengan yang diminta JCPOA. Menurut Trump, kesepakatan tersebut masih tidak begitu lengkap karena tidak merumuskan masalah rudal balistik, aktivitas nuklir Iran pasca 2025 dan peran Iran di Suriah.

Menurut Bowman (2008), Amerika Serikat memiliki tiga kepentingan utama di kawasan Timur Tengah. Pertama, kepentingan jangka panjang. Kepentingan jangka panjang Amerika Serikat ialah untuk mengamankan jalur minyak dari kawasan Teluk Persia ke Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Kedua, untuk memastikan agar aktor negara ataupun aktor bukan negara di sekitar kawasan Timur Tengah tidak mengembangkan, memperoleh atau menggunakan senjata pemusnah massal atau *weapon of mass destruction*. Ketiga, membantu kawasan tersebut agar tidak menjadi tempat, panggung aksi, pengeksport ekstrimis Islam yang dalam aksinya menggunakan dan mengandalkan kekerasan. Ekstrimis Islam yang dimaksud disini ialah kelompok-kelompok yang berusaha menegakkan kembali negara islam.

Apabila Iran semakin kuat dengan kekuatan nuklir yang dimilikinya, hal ini tentu saja dapat membuat hegemoni Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah rentan, dimana Irak dan Afganistan telah berada dibawah kendali Amerika Serikat. Disamping itu pun upaya

pengembangan nuklir yang dikembangkan oleh Iran telah menciptakan pusat kekuatan baru yang bisa menekan supremasi Israel sebagai negara yang diangkat menjadi tangan kiri oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dan beberapa negara barat yang lain pun menganggap bahwa program nuklir yang dikembangkan oleh Iran dapat menjadi suatu bentuk ancaman bagi kelangsungan perdamaian dunia.

Dengan mengkaji dan menganalisa uraian diatas maka penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan dampak kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap pengembangan nuklir Iran. Dengan judul **“Dampak Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Dengan Keluarnya Dari Kesepakatan JCPOA Terhadap Pengembangan Nuklir Iran Pada Masa Jabatan Presiden Donald Trump”**

1.2 Identifikasi Masalah

Mengacu kepada latar belakang yang penulis telah jelaskan, maka dari itu dapat diuraikan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi ancaman Amerika Serikat terhadap pengembangan nuklir Iran?
2. Bagaimana fenomena pengembangan nuklir Iran?
3. Bagaimana dampak dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan keluarnya dari kesepakatan JCPOA terhadap pengembangan nuklir Iran?

1.2.1 Pembatasan Masalah

Agar pembahasan di dalam skripsi ini lebih fokus, mendalam dan tidak meluas dari pembahasan yang diharapkan, oleh karena itu perlu adanya pembatasan masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokus. Penelitian ini akan dibatasi pada jangkauan pembahasan, arah dan waktu dampak dari keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan JCPOA.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah serta pembatasan masalah yang telah penulis sebutkan sebelumnya, dalam penelitian ini rumusan masalah yang akan penulis angkat adalah “Bagaimana tindakan dan upaya Amerika Serikat dalam menghadapi program pengembangan nuklir Iran?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan diatas, terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai penulis dalam tulisan ini. Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui kepentingan Amerika Serikat di Kawasan Timur Tengah khususnya di Iran.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengembangan nuklir Iran.
3. Untuk mengetahui dampak kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap pengembangan nuklir Iran.

1.3.1 Kegunaan Penelitian

Mengacu kepada tujuan penelitian yang telah penulis uraikan, adapun kegunaan dari penelitian ini dikemukakan dari dua sisi, yaitu :

1. Kegunaan teoritis, dari penelitian ini penulis berharap dapat memberi secara teoritis, sekurang-kurangnya untuk menambah wawasan tentang Dampak dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Pengembangan Nuklir Iran.
2. Kegunaan praktis dari penelitian ini, yaitu :
 - a. Untuk memenuhi salah satu tanggung jawab dalam menempuh program studi S-1 dengan membuat suatu karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat kelulusan pada program studi Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Pasundan Bandung;
 - b. Memberikan manfaat pada akademik maupun aplikatif kepada masyarakat dan akademisi pada umumnya dan kepada penulis pada khususnya; dan
 - c. Secara khusus memberikan informasi kepada pihak lain yang berminat untuk meneliti masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan menjadi referensi bagi pengembangan dan bagi pihak yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengembangan nuklir Iran yang didalamnya juga terdapat sikap politik Amerika Serikat.

